



ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2017-2021 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ANALYSIS OF INDEPENDENCE RATIO, EFFECTIVENESS RATIO, AND REGIONAL FINANCIAL GROWTH RATIO ASSESS FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENTS 2017-2021 AT THE AGENCY OFFICE DISTRICT REGIONAL REVENUE SERDANG DELI

Diana Syahfitri S. Hasugian^{1*}, Indah Cahya Sagala², Hasbiana Dalimunthe³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Medan Area,
Email : dianasyahfitri795@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Medan Area,
Email : indahcahyasagala@staff.uma.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Medan Area,
Email : hasbianadalimunthe@staff.uma.ac.id

E-mail coresponden : dianasyahfitri795@gmail.com

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.77

Article info:

Submitted: 27/02/24

Accepted: 24/04/24

Published: 30/04/24

Abstract

This research aims to assess the analysis of the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Regional Financial Growth Ratio in assessing financial performance measurements for 2017-2021 at the Deli Serdang Regency Regional Revenue Agency Office. The sample in this study used purposive sampling, namely financial reports on the realization of the budget and regional tax revenues of Deli Serdang Regency. The population in this research is financial reports. The type of data used is in the form of Qualitative Descriptive. The data source used is secondary data in the form of financial reports. The research results show that the regional financial independence ratio is categorized as capable because the region is already independent in matters of regional autonomy. Meanwhile, the PAD effectiveness ratio in 2017 was classified as quite effective and in 2018 was classified as less effective, namely 95.79% and 78.50%, respectively, in 2019, 2020 and 2021 it decreased, namely 69.56%, 68.05% , and 54.76%, has an average effectiveness ratio of 73.33% which is included in the ineffective group. The growth ratio illustrates that local governments cannot maintain and increase success from one period to the next.

Keywords: Regional Financial Independence Ratio, Financial Effectiveness Ratio Regions, Regional Financial Growth Ratios, Financial Performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Jenis Data yang digunakan berbentuk Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan mampu karena daerah tersebut sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan tahun 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79% dan 78,50%, pada tahun 2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76%, memiliki rata-rata rasio efektivitas sebesar 73,33% yang termasuk golongan tidak efektif. Untuk rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu perubahan besar dalam aspek ekonomi adalah kondisi pemerintahan daerah, dimana daerah yang telah ditetapkan memiliki otonomi daerah sendiri dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, menjadikan kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Pemberian otonomi daerah dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang lebih baik dan demokratis dalam menggali potensi daerah yang ada serta sebesar-besarnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setempat (Kementerian Keuangan, 2015). Dalam rangka memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah yang dipimpin, pimpinan daerah dapat memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah berdasarkan dari pendapatan daerah sendiri maupun dari luar daerah. Adapun sumber-sumber yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah yang kemudian akan dikelola sesuai dengan kebutuhan daerah, melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, baik untuk peningkatan mutu pemerintahan daerah maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan keuangan (financial management), merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah (Purba et al., 2021), yang didalam pelaksanaannya pemerintah daerah merealisasikan keuangan daerahnya melalui BAPENDA untuk mengelola keuangan daerah, sehingga menjadikan kinerja keuangan sebagai tolak ukur satu keberhasilan bagi daerah yang memiliki otonominya sendiri. Untuk memberikan hasil yang maksimal dalam kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan menggunakan satu teknik analisis laporan keuangan yang menghubungkan dua data keuangan dengan membagi satu data dengan data lainnya atau disebut juga dengan metode analisis rasio keuangan (Lukianda, 2013) Hasil dari analisis rasio keuangan selanjutnya akan

dipergunakan sebagai evaluasi untuk menilai tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan daerah. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur didalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan rakyat serta transportasi darat dan laut, sehingga masyarakat turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor potensi utama daerah, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi yang pada akhirnya tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Azuwandri et al., 2019)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang memiliki anggaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahun menyebabkan terjadinya surplus. Mengingat terjadinya surplus dari anggaran tersebut dapat di anggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, dan pembentukan dana cadangan (Misalnya: untuk dana pilkada, untuk pembangunan infrastruktur), maka Rasio Keuangan yang akan sangat di perlukan dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio efektif dan efisiensi pendapatan asli daerah, dan Rasio pertumbuhan. Berikut beberapa tabel yang menjelaskan permasalahan keuangan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab.Deli Serdang untuk Tahun yang berakhir 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Target	Penyerapan (%)
2017	Rp 582.022.000.000	Rp 557.559.474.513,97	Rp 582.022.000.000	95,80%
2018	Rp 720.622.000.000	Rp 565.695.087.233,91	Rp 720.622.000.000	78,50%
2019	Rp 945.382.220.000	Rp 657.659.715.077,32	Rp 945.382.220.000	69,57%
2020	Rp 881.671.250.000	Rp 600.005.646.014,17	Rp 881.671.250.000	68,05%
2021	Rp 1.218.522.247.055	Rp 677.355.993.160,45	Rp 1.218.522.247.055	55,59%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang dimulai dari tahun anggaran 2017-2021 terdapat 5 (lima) periode anggaran yang belum semuanya terealisasi mencapai 100% serapan anggaran yang disahkan. Persentase tingkat penyerapan anggaran PAD yang hampir mendekati standar realisasi anggaran yang terjadi terkait kinerja keuangan, untuk target kinerja keuangan tahun 2017 yaitu sebesar 95,80% dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah APBD sebesar Rp 557.559.474.513,97 dibagi dengan pendapatan APBD sebesar Rp 582.022.000.000. dan ternyata pada tahun 2018 kinerja keuangan hanya sebesar 78,50% atau Rp 565.695.087.233,91 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 mencapai 95,80% atau Rp 557.559.474.513,97. Berdasarkan fenomena diatas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, khususnya dalam kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang karena hasil tahun 2018 sebesar 78,50%, kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan target. Meningkatnya anggaran alokasi PAD per tiap periode anggaran tidak selalu diiringi dengan meningkatnya realisasi penyerapan anggaran, hal tersebut mengindikasikan jika kurang maksimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam proses

pemanfaatan sumber penerimaan daerah berupa PAD terkait dengan pengeluaran belanja atas penyenggaraan urusan pemerintahan dan kebutuhan daerah.

Dari data diatas setiap tahun laporan realisasi Badan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan, seharusnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang harus bisa meningkatkan realisasi setiap tahun nya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pemaparan fenomena atau permasalahan yang terjadi di atas mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:124) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021. Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor Badan Pendapatan Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2017-2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 4.1 Pola hubungan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Sijabat dkk (2014)

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 557.559.474.513,97}{\text{Rp } 582.022.000.000} \times 100\% \\ &= 95,79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 565.695.087.233,91}{\text{Rp } 720.622.000.000} \times 100\% \\ &= 78,50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 657.659.715.077,32}{\text{Rp } 945.382.220.000} \times 100\% \\ &= 69,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 600.005.646.014,71}{\text{Rp } 881.671.250.000} \times 100\% \\ &= 68,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 667.355.993.160,45}{\text{Rp } 1.218.522.247.055} \times 100\% \\ &= 54,76\% \end{aligned}$$

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2017	Rp. 557.559.474.513,97	Rp.582.022.000.000	95,79%	Delegatif
2018	Rp.565.695.087.233,91	Rp.720.622.000.000	78,50%	Delegatif
2019	Rp.657.659.715.077,32	Rp.945.382.220.000	69,56%	Partisipatif
2020	Rp.600.005.646.014,17	Rp.881.671.250.000	68,05%	Partisipatif
2021	Rp.667.355.993.160,45	Rp.1.218.522.247.055.	54,76%	Partisipatif
Rata-rata			73,33%	Partisipatif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 diatas, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang tergolong kemampuan keuangan tinggi pada tahun 2017, yaitu 95,79% dan tahun 2018 sebesar 78,50% yang termasuk dalam pola hubungan delegatif dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada dikarenakan daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, tetapi dari tahun 2019-2021 mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2019,2020, dan 2021 termasuk kemampuan keuangan sedang masing-masing sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76% yang termasuk dalam pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap bantuan dari pusat sudah berkurang bahkan tidak ada karena daerah tersebut benar-benar mampu dan mendekati mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas PAD

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Sijabat dkk (2014)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 557.559.474.513,97}{\text{Rp } 582.022.000.000} \times 100\% \\ &= 95,79\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 565.695.087.233,91}{\text{Rp } 720.622.000.000} \times 100\% \\ &= 78,50\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 657.659.715.077,32}{\text{Rp } 945.382.220.000} \times 100\% \\ &= 69,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 600.005.646.014,17}{\text{Rp } 881.671.250.000} \times 100 \% \\ &= 68,05\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 667.355.993.160,45}{\text{Rp } 1.218.522.247.055} \\ &= 54,76 \end{aligned}$$

Besarnya rasio efektivitas pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Deli Serdang Anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Pola Hubungan
2017	Rp. 557.559.474.513,97	Rp.582.022.000.000	95,79%	Cukup Efektif
2018	Rp.565.695.087.233,91	Rp.720.622.000.000	78,50%	Kurang Efektif
2019	Rp.657.659.715.077,32	Rp.945.382.220.000	69,56%	Tidak Efektif
2020	Rp.600.005.646.014,17	Rp.881.671.250.000	68,05%	Tidak Efektif
2021	Rp.667.355.993.160,45	Rp.1.218.522.247.055	54,76%	Tidak Efektif
Rata-rata			73,33%	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 tergolong cukup efektif yaitu sebesar 95,79%. Pada tahun 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 78,50%. Pada tahun 2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76% yang termasuk dalam pola hubungan tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang belum mampu meningkatkan dan mempertahankan efektivitas daerah. Karena rasio efektivitas yang didapatkan setiap tahunnya berada dibawah 100%.

c. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat (2014)

Keterangan :

PAD_{t1} – PAD_{t0} = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya

PAD_{t0} = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 557.559.474.513,97 - \text{Rp } 432.131.845.878,56}{\text{Rp } 432.131.845.878,56} \times 100\%$$

$$= 29,02\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 565.695.087.233,91 - \text{Rp } 557.559.474.513,97}{\text{Rp } 557.559.474.513,97} \times 100\%$$

$$= 1,45\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 657.659.715.077,32 - \text{Rp } 565.695.087.233,91}{\text{Rp } 565.695.087.233,91} \times 100\%$$

$$= 16,25\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 600.005.646.014,17 - \text{Rp } 657.659.715.077,32}{\text{Rp } 657.659.715.077,32} \times 100\%$$

$$= -8,76\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 677.355.993.160,45 - \text{Rp } 600.005.646.014,17}{\text{Rp } 600.005.646.014,17} \times 100\%$$

$$= 12,89\%$$

Besarnya rasio pertumbuhan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Deli Serdang Anggaran 2017-2021

Tahun	PADt1 (Rp)	PADt0 (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2017	Rp.557.559.474.513,97	Rp.432.131.845.878,56	29,02%
2018	Rp.565.695.087.233,91	Rp.557.559.474.513,97	1,45%
2019	Rp.657.659.715.077,32	Rp.565.695.087.233,91	16,25%
2020	Rp.600.005.646.014,17	Rp.657.659.715.077,32	-8,76%
2021	Rp.677.355.993.160,45	Rp.600.005.646.014,17	12,89%
Rata-rata			10,17%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang .

Berdasarkan perhitungan tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada kantor Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar 29,02% mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1,45%, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 16,25%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 12,89%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) sudah dikategorikan mampu dikarenakan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang atau bahkan sudah tidak ada karena mengingat daerah yang benar-benar sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah.

2. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79%, dan 78,50%. Tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang belum mampu meningkatkan dan mempertahankan efektivitas daerah karena rasio efektivitas setiap tahunnya berada dibawah 100%. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur efektivitas suatu daerah.
3. Untuk rasio pertumbuhan dikatakan bahwa rasio pertumbuhan pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada kantor Badan Pendapatan Daerah tahun 2017-2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,25%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 yaitu sebesar -8,76%, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 12,89%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azuwandri, A., Ekaputri, R. A., & Sunoto, S. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 199–208. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i2.834>
- Anggaran Program Dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023. <https://deliserdangkab.bps.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2015. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>.
- Lukianda, N. (2013). Implementasi Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal WIGA*, 3(2), 54–69.
- Purba, et.al. (2021), Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sijabat, Saleh, Wachid. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.